



**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

---

# **Sekretariat Tim Kerja Konektivitas MP3EI**

**KLIPING  
BERITA MEDIA CETAK  
TIM KERJA KONEKTIVITAS**

---

**HARI SABTU, 12 MARET 2013**



DAFTAR ISI

Tol Trans-Jawa .....	1
Proyek MRT .....	2
Infrastruktur .....	3
PLTP Sarulla .....	4
Monorel .....	5



Kementerian  
Perencanaan Pembangunan Nasional/  
BAPPENAS

# KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

## Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☒ Kompas  
☐ Republika  
☐ Rakyat Merdeka  
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia  
☐ Sinar Harapan  
☐ Seputar Indonesia  
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo  
☐ Suara Pembaruan  
☐ Investor Daily  
☐ Jurnal Nasional
- ☐ Bisnis Indonesia  
☐ Pikiran Rakyat  
☐ Kontan  
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,  
.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Tol Trans-Jawa Terhambat Lahan	<div>- Dari total luas 5.150,53 hektar baru 2.647,19 hektar atau sekitar 51,4 persen lahan yang telah diselesaikan</div> <div>- Hal lain penghambat pembebasan lain selain masalah harga antara pemerintah dan warga adalah masalah administrasi seperti hak ahli waris, sertifikat tanah dan lain sebagainya.</div> <div>- Pembangunan konstruksi masih bisa ditargetkan, namun untuk pembebasan lahan, sulit diprediksi</div>					

# Tol Trans-Jawa Terhambat Lahan

## Setiap Ruas Miliki Masalah Tersendiri

JAKARTA, KOMPAS — Usaha pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol trans-Jawa yang dimulai sejak 2007, hingga saat ini masih terhambat permasalahan pembebasan lahan. Dari total luas 5.150,53 hektar baru 2.647,19 hektar atau sekitar 51,4 persen lahan yang telah selesai dibebaskan.

Kepala Pusat Komunikasi Publik, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Danis H Sumadilaga mengungkapkan, pembangunan infrastruktur jalan tol ini sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan kebutuhan ekonomi.

"Sayangnya hal itu kerap terhambat masalah pembebasan lahan yang akan digunakan untuk jalan tol, padahal pembangunan ini juga tujuannya untuk pertumbuhan ekonomi," ujar Danis dihadapan para wartawan yang hadir dalam forum diskusi di Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Kamis (11/4).

Menurut Danis, pembebasan tersebut kerap kali harus menghadapi lahan-lahan yang sulit. "Lahan seperti wilayah kehutanan, tanah wakaf, tanah kas desa, dan lain sebagainya, harus kami cari gantinya. Kementerian Pekerjaan Umum juga sudah melakukan kewajiban harga. Penggantian tersebut sudah wajar dan baik," katanya.

Khusus untuk pembebasan lahan, masih menurut Danis, pemerintah mengalokasikan dana setiap tahunnya sekitar Rp 1 triliun.

"Tahun 2011 dana yang terserap hanya Rp 600 miliar, sedangkan tahun 2012 dana yang terserap sebesar Rp 800 miliar. Saya berharap tahun ini dana yang terserap semakin besar sehingga pembebasan tanah juga semakin luas," tuturnya.

Danis juga mengatakan, dana

kompensasi untuk pembebasan lahan tidak menjadi masalah di Kementerian Pekerjaan Umum.

"Beberapa kali sudah tercapai kesepakatan mengenai harga antara pemerintah dan warga. Namun, hal itu harus terhambat masalah administrasi seperti hak ahli waris, sertifikat tanah, dan lain sebagainya," ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Kasubdit Pengadaan Tanah Achmad Herry Marzuki yang mengatakan, pihaknya mengalami kesulitan dalam melakukan pembebasan beberapa tanah untuk sembilan ruas tol dari Cikopo hingga Surabaya. Adapun sembilan ruas tersebut, yaitu Cikopo-Palimanan, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Semarang-Solo, Solo-Mantingan, Mantingan-Kertosono, Kertosono-Mojokerto, Mojokerto-Surabaya.

"Setiap ruas memiliki permasalahan sendiri, antara lain adanya desakan dari berbagai forum masyarakat (LSM), adanya warga yang meminta agar pembebasan ditunda dulu mengingat akan dilakukan pemilihan kepala desa, dan ada juga pemilik yang mengajukan syarat-syarat yang sulit direalisasi. Padahal jelas, kami memberikan harga yang bagus, sesuai dengan permintaan dan pastinya di atas harga pasar," kata Herry.

Beberapa permasalahan di setiap ruas juga dipaparkan oleh Herry. Menurut dia, ruas Pejagan-Pemalang-Batang-Semarang sampai saat ini terkendala

masalah tanah karena adanya pergantian investor. Sementara untuk ruas Semarang-Solo, pembangunan sudah sampai seksi Semarang-Ungaran. Diharapkan pada Juni tahun ini seksi Ungaran-Bawen sudah selesai penggarapannya sehingga dapat digunakan saat lebaran tahun ini.

Adapun untuk ruas Solo-Mantingan yang baru selesai 73,38 persen dan Mantingan-Kertosono yang baru selesai 43,27 persen tahun ini diharapkan bisa selesai 100 persen. Mengingat di wilayah tersebut terdapat 125 hektar kawasan hutan dengan panjang 12 kilometer. Adapun untuk ruas Kertosono-Mojokerto, saat ini sudah sampai tahap pelaksanaan fisik hingga 84 persen.

Di ruas Mojokerto-Surabaya, beberapa seksi harus terhambat akibat lahan yang akan digunakan untuk jalan tol masih terdapat pabrik dan gudang. Namun, Herry mengatakan, pihaknya telah berusaha bertemu dengan jajaran direksi perusahaan untuk membicarakan pembebasan lahan lebih lanjut. Tak hanya itu, Herry juga sempat menemukan warga yang memiliki tanah berupa sawah, tetapi ingin tanahnya dihargai senilai tanah permukiman.

Saat ditanya mengenai jangka waktu pembebasan lahan, Herry mengatakan, pihaknya kesulitan menentukan target waktunya.

"Kalau pembangunan konstruksi masih bisa ditargetkan. Namun, untuk pembebasan lahan, sulit untuk diprediksi," ujarnya.

Herry berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh ajakan untuk menolak pembebasan lahan.

"Saya yakin masyarakat itu untung dengan kompensasi yang kami berikan. Harganya di atas harga pasar," tutur Herry. (K10)





Kementerian  
Perencanaan Pembangunan Nasional/  
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☒ Kompas  
☐ Republika  
☐ Rakyat Merdeka  
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia  
☐ Sinar Harapan  
☐ Seputar Indonesia  
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo  
☐ Suara Pembaruan  
☐ Investor Daily  
☐ Jurnal Nasional
- ☐ Bisnis Indonesia  
☐ Pikiran Rakyat  
☐ Kontan  
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,  
.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Proyek MRT Terganjil Administrasi	<div>- Untuk kelanjutan pembangunan, perlu pencairan pinjaman dengan syarat persetujuan dari Bappenas</div> <div>- Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) telah menyetujui pinjaman dana Rp. 15 triliun untuk proyek pembangunan MRT Ruas Depok-Lebak Bulus-Sisingamangaraja sepanjang 9,8 km (layang) dan ruas Senayan-Bundaran HI sepanjang 5,9km (bawah tanah)</div>					

TRANSPORTASI PUBLIK

Proyek MRT Terganjil Administrasi

JAKARTA, KOMPAS — Percepatan proyek pembangunan transportasi cepat massal di Jakarta lagi-lagi menghadapi sandungan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Kamis (11/4), mengatakan masih ada kendala administrasi yang baru saja diketahui direksi PT MRT Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, harus ada revisi persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan pinjaman dari Bappenas.

(Sambungan dari halaman 1)

baru dari DPRD. "Saya baru tahu. Kalau begitu, DPRD memang harus segera menyetujui dan mendukung penuh," katanya.

Basuki meminta Menteri Dalam Negeri tidak menunggu revisi persetujuan dari DPRD DKI Jakarta karena didesak waktu. Pemprov DKI Jakarta menargetkan, pada akhir April, pemenang lelang konstruksi MRT sudah harus diumumkan. Masih perlu proses selama 42 hari untuk urusan dokumen, banding, sampai kontrak. Setelah itu, pembangunan fisik baru benar-benar bisa dimulai.

Sementara itu, untuk kelanjutan pembangunan, perlu pencairan pinjaman dengan syarat persetujuan dari Bappenas. Rapat Koordinasi Pelaporan Pembangunan melarang pengumuman kontrak jika tidak ada uang yang tersedia.

Jalan keluarnya harus dikejar untuk pembuatan revisi surat

Batas waktu dari Bappenas untuk mendapat persetujuan sudah lewat, 5 April. Kami juga baru tahu," kata Basuki sesuai menggelar rapat bersama direksi PT MRT Jakarta di Balaikota.

"Salah kami (Pemprov DKI Jakarta) juga karena tidak mengurus sampai ke situ. Direksi baru juga tidak tahu. Tetapi, seharusnya ini sudah diketahui sejak lama. Kan, dari tahun 2007, proyek sudah disetujui. Aduh...," ujar Basuki dengan nada geram.

Revisi persetujuan harus dibuat karena pembagian beban pengembalian pinjaman antara pemerintah pusat dan Pemprov

persetujuan. "Nanti PT MRT akan rapat dengan direktur di Kementerian Dalam Negeri dan direktur di Kementerian Keuangan," kata Basuki.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Sarwo Handayani menjamin, persoalan administrasi itu tidak akan membuat jadwal pembangunan MRT mundur. "Rekomendasi sedang diproses untuk dipercepat. Belum tahu berapa lama prosesnya. Tetapi, pembangunan MRT tidak akan mundur," katanya.

Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) telah menyetujui pinjaman dana Rp 15 triliun untuk proyek pembangunan MRT ruas Depok-Lebak Bulus-Sisingamangaraja sepanjang 9,8 kilometer (layang) dan ruas Senayan-Bundaran Hotel Indonesia sepanjang 5,9 kilometer (bawah tanah). Namun, JICA belum memberikan pinjaman

DKI Jakarta sudah berubah. Semula, pembagian beban adalah 58 persen DKI dan 42 persen pusat. Setelah renegosiasi, pembagian beban menjadi 51 persen DKI dan 49 persen pusat.

Basuki menambahkan, persetujuan dari Menteri Dalam Negeri masih menunggu persetujuan dari DPRD DKI Jakarta. Surat persetujuan dari DPRD belum ada sampai sekarang.

Selamat Nurdin, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, yang membidangi transportasi, mengaku baru tahu perlunya rekomendasi

(Bersambung ke hal 15 kol 6-7)

untuk ruas Bundaran Hotel Indonesia-Kampung Bandan sepanjang 8,1 kilometer.

**Harus dimulai**

Dalam kuliah umum di Universitas Pelita Harapan, Karawaci, Kota Tangerang, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan agar proyek MRT secepatnya dikerjakan.

"Saya baru beberapa bulan menjabat, tetapi sudah banyak yang menanyakan tentang proyek itu. Bulan ini (April) MRT akan kita mulai. Setelah MRT, bulan depan (Mei) proyek monorel harus dimulai. Apa pun caranya, proyek itu harus dimulai," ujar Jokowi.

Jokowi mengetahui, banyak warga yang meragukan kemampuannya mengatasi kemacetan Jakarta. Akan tetapi, mantan Wali Kota Solo itu berjanji akan membuktikan bahwa dirinya mampu merealisasikan pemba-

ngunan MRT dan monorel.

Menurut Jokowi, pembangunan proyek MRT dan monorel membutuhkan waktu yang lama. Pengerjaan proyek MRT membutuhkan waktu tujuh tahun, sementara pembangunan monorel membutuhkan waktu tiga tahun.

"Meski harus menunggu lama dan Jakarta akan terjebak macet saat pengerjaan dua proyek ini, kegiatan itu harus berjalan sesuai waktu yang ditargetkan. Apa pun caranya, kedua proyek besar itu harus segera terealisasi. Ini untuk mengatasi macet Jakarta," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, proyek MRT berjalan mandek selama 24 tahun terakhir. Sementara proyek monorel tidak berjalan selama 14 tahun sejak direncanakan. "Singapura membutuhkan waktu tujuh tahun untuk mengajak masyarakatnya menggunakan MRT. Kalau negara lain bisa, mengapa kita tidak bisa," ujar Jokowi. (FRO/NDY/PIN)



Kementerian  
Perencanaan Pembangunan Nasional/  
BAPPENAS

# KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

## Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<input type="checkbox"/> Jan	<input type="checkbox"/> Feb	<input checked="" type="checkbox"/> Mar	<input type="checkbox"/> Apr	<input type="checkbox"/> Mei	<input type="checkbox"/> Jun	<input type="checkbox"/> Jul	<input type="checkbox"/> Agt	<input type="checkbox"/> Sep	<input type="checkbox"/> Okt	<input type="checkbox"/> Nov	<input type="checkbox"/> Des																			

2013

<input checked="" type="checkbox"/> Kompas	<input type="checkbox"/> Media Indonesia	<input type="checkbox"/> Koran Tempo	<input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia
<input type="checkbox"/> Republika	<input type="checkbox"/> Sinar Harapan	<input type="checkbox"/> Suara Pembaruan	<input type="checkbox"/> Pikiran Rakyat
<input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka	<input type="checkbox"/> Seputar Indonesia	<input type="checkbox"/> Investor Daily	<input type="checkbox"/> Kontan
<input type="checkbox"/> Suara Karya	<input type="checkbox"/> Neraca	<input type="checkbox"/> Jurnal Nasional	<input type="checkbox"/> Indopos
<input type="checkbox"/> Lain-lain, .....			

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Maju Mundur Kualanamu	- Penyelesaian fisik bandara sudah rampung 94,97 persen - Pembebasan lahan untuk akses jalan dari dan menuju bandara belum tuntas - Hampir setiap proyek infrastruktur di negeri ini terganjal masalah lahan			Rp.4,7 triliun	PT. Angkasa Pura II	

### INFRASTRUKTUR

## Maju Mundur Kualanamu

Proyek pembangunan Bandar Udara Internasional Kualanamu, Sumatera Utara, sudah memasuki tahun keenam. Penyelesaian proyek yang semula ditargetkan tuntas akhir tahun 2012, beberapa kali diundur. Belum jelas, kapan bandara baru pengganti Bandara Internasional Polonia, Medan, ini mulai beroperasi.

Hingga pekan ini, penyelesaian fisik bandara sudah rampung 94,97 persen. Proyek sektor privat yang dibangun oleh pengelola bandara, PT Angkasa Pura II, masih dalam tahap penyelesaian, antara lain stasiun kereta api, gedung administrasi, perkantoran kargo, masjid, dan gedung peralatan (AME). Adapun terminal penumpang dan stasiun pengisian bahan bakar sudah tuntas.

Pembangunan sektor publik, seperti landasan pacu (*runway*), jalur parkir (*taxiway*), parkir pesawat (*apron*), perkantoran, stasiun radar, fasilitas navigasi (DVOR/DME), stasiun pemadam kebakaran, dan pusat listrik juga sudah selesai.

Kendala utama justru pada aksesibilitas bandara. Pembebasan lahan untuk akses jalan dari dan menuju ke bandara belum tuntas. Pihak PT Angkasa Pura II memperkirakan masih 800 meter lahan mencakup 45 keluarga, belum dibebaskan.

Sudah masalah klasik, hampir setiap proyek infrastruktur di negeri ini terganjal masalah lahan. Tarik-menarik kepentingan tak terelakkan. Namun, jika masalah lahan dibiarkan berlarut-larut, investasi yang telanjur digelontorkan untuk proyek pembangunan ikut macet. Uang negara terkena imbasnya.

Sebagai catatan, pembangunan Bandara Internasional Kualanamu sejak tahun 2007 hingga Januari 2013 telah menyerap total anggaran Rp 4,7 triliun. Dari alokasi tersebut, dana Rp 3,4 triliun bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan dari PT Angkasa Pura II sebesar Rp 1,3 triliun.

Tengoklah akses kereta api Bandara Kualanamu yang kini sudah tuntas. Jalur tunggal sepanjang 29 kilometer itu siap dioperasikan. Sarana kereta api rute Medan-Bandara Kualanamu itu hanya menunggu atap stasiun. Operasional kereta jelas ikut tertunda jika bandara baru belum bisa berfungsi.

Sepanjang tahun 2012, Bandara Polonia, Medan, yang hanya memiliki kapasitas 900.000 penumpang per tahun terpaksa saat ini dijejali hingga

mencapai 7,9 juta penumpang. Kapasitas itu jauh di bawah Bandara Kualanamu yang mampu menampung 8,1 juta penumpang per tahun.

Di tengah terus meningkatnya penumpang pesawat dan menurunnya daya dukung Bandara Polonia, dibutuhkan gerak cepat untuk segera mengoperasikan bandara baru. Pemerintah daerah perlu turun tangan mempercepat pembebasan lahan.

Sejumlah polemik masih muncul di kalangan penduduk sekitar Bandara Kualanamu yang terkena penggusuran lahan. Penduduk eks transmigrasi yang menetap sejak tahun 1961 merasa diabaikan oleh pemerintah. Mereka merasa tidak mendapat ganti rugi sesuai kesepakatan awal.

Ponirin (42), warga Dusun Dalu 10, Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, mengemukakan, awalnya pemerintah menjanjikan ganti rugi harga tanah senilai Rp 300.000 per meter persegi. Namun, biaya ganti rugi lalu diturunkan menjadi Rp 75.000 per meter persegi, dan belakangan pemerintah tidak mau membayar ganti rugi karena lahan yang ditinggali masyarakat itu dinilai tanah berstatus hak guna usaha (HGU) milik PT Perkebunan Nusantara II.

Sejauh ini, ganti-rugi lahan sebesar Rp 300.000 per meter persegi hanya diberikan untuk warga yang telah memiliki sertifikat lahan. Sedangkan sebagian warga yang menetap puluhan tahun dengan mengantongi surat keterangan camat untuk kepemilikan lahan tidak memperoleh solusi.

Kemajuan penyelesaian proyek fisik bandara janganlah menjadi mundur karena masalah lahan yang berlarut-larut. Apalagi, Bandara Kualanamu ditargetkan menjadi gerbang masuk NKRI dan penghubung (*hub*) antarnegara. Kearifan pemerintah dibutuhkan untuk mengatasi polemik ini. Sekaligus agar bandara yang sudah menelan biaya Rp 4,7 triliun ini bisa segera beroperasi. (BM LU/KITA GRAHADYARINI)







Kementerian  
Perencanaan Pembangunan Nasional/  
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☐ Kontan
- ☐ Lain-lain,
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☒ Indopos

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
PLTP Sarulla Jangan Ada Lagi Hambatan Proyek	<div>- Persetujuan amandemen kontrak penjualan energi dan kontrak pengoperasian bersama PLTP Sarulla 3x110 megawatt (MW) diserahkan Menteri ESDM Jero Wacik kepada PT. PLN dan PT. Pertamina Geothermal Energy (PT. PGE)</div> <div>- PLTP Sarulla ini merupakan pembangkit terbesar dalam program Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000MW Tahap II</div>					

PLTP SARULLA

Jangan Ada Lagi Hambatan Proyek

JAKARTA, KOMPAS — Berlarut-larutnya penyelesaian proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Sarulla, Sumatera Utara, menunjukkan banyaknya simpul yang menghambat di berbagai tingkatan dan sektor. Wakil Presiden Boediono berharap keberhasilan mengurai simpul yang menghambat pada proyek Sarulla itu menjadi pelajaran berharga agar tidak ada lagi hambatan pada proyek serupa.

"Harus kita atasi simpul-simpul yang menghambat dengan koordinasi yang lebih awal dan lebih menyeluruh. Jangan sampai setiap kali ada kasus, para menteri harus turun tangan seperti yang kita lakukan untuk Sarulla ini," kata Wakil Presiden (Wapres) Boediono, Kamis (11/4), saat seremoni penyerahan persetujuan kerja sama Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla.

Persetujuan amandemen kontrak penjualan energi (*energy sales contract*) dan kontrak pengoperasian bersama (*joint operating contract*) PLTP Sarulla 3x110 megawatt (MW) diserahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik kepada PT PLN dan PT Pertamina Geothermal Energy (PT PGE).

Selain itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo juga menyerahkan surat jaminan kelayakan usaha (SJKU) kepada konsorsium Sarulla Operations Limited



Boediono

(SOI). Wapres menekankan, setelah penyerahan persetujuan proyek itu, PLTP Sarulla harus segera dibangun dan dioperasikan.

Proyek PLTP Sarulla di Sumatera Utara macet bertahun-tahun, sejak digagas 23 tahun silam. Berbagai hambatan proyek ini mulai diurai dan ditangani serius di bawah koordinasi Wapres sejak Desember 2010.

PLTP Sarulla ini merupakan pembangkit terbesar dalam program Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW Tahap II, di mana hampir 50 persennya berasal dari panas bumi. Investasi proyek ini mencapai 1,5 miliar dollar AS yang didanai swasta, yakni Medco Energi dan konsorsium perusahaan multinasional Itochu, Kyusu, dan

Ormat. Sekitar 80 persen pendanaan investasi ini berasal dari pinjaman lunak Japan Bank for International Cooperation melalui skema produsen listrik swasta (*independent power producer*).

Menurut Wapres, pemerintah sangat mendukung proyek pembangunan PLTP karena mendatangkan keuntungan finansial maupun nonfinansial. Jika proyek ini dapat dioperasikan seperti yang diharapkan, biaya produksi energi listrik PLTP Sarulla 6,79 sen dollar AS per kilowatt hour (kWh). Biaya itu jauh lebih murah dibandingkan biaya pokok produksi listrik rata-rata nasional sebesar 13 sen dollar AS per kWh. Penghematan subsidi listrik dengan pengoperasian PLTP Sarulla, diperkirakan mencapai Rp 4 triliun per tahun.

Keuntungan nonfinansial yang diperoleh, pengoperasian PLTP dapat menekan emisi CO<sub>2</sub> dalam produksi energi listrik. Diperkirakan pengoperasian PLTP Sarulla dapat menekan emisi CO<sub>2</sub> hingga 1 juta ton per tahun.

Jero Wacik menargetkan pemancangan tiang perdana (*groundbreaking*) proyek bisa dilakukan sebelum periode Kabinet Indonesia Bersatu II selesai 1,5 tahun mendatang. "Sekarang tinggal realisasi proyek. Saya minta semua yang terlibat dalam proyek ini jangan berlama-lama," kata Jero. (WHY)



Kementerian  
Perencanaan Pembangunan Nasional/  
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☒ Kompas  
☐ Republika  
☐ Rakyat Merdeka  
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia  
☐ Sinar Harapan  
☐ Seputar Indonesia  
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo  
☐ Suara Pembaruan  
☐ Investor Daily  
☐ Jurnal Nasional
- ☐ Bisnis Indonesia  
☐ Pikiran Rakyat  
☐ Kontan  
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain, .....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Adhi Masih Minat Garap Monorel	<div><div>- PT. Adhi Karya(Tbk) Masih tertarik jalur monorel yang digarap PT. Jakarta Monorail (JM). Ini menyusul kesan lambannya JM memulai proyek tersebut</div><div>- Sejak awal Adhi Karya sudah siap, termasuk grand design nya</div><div>- Untuk tahap pertama Adhi berencana membangun monorel dengan jalur dari Bekasi Timur ke Cawang, Cibubur ke Cawang dan Cawang – Kuningan.</div></div>				PT. Adhi Karya	

Adhi Masih Minat Garap Monorel

JAKARTA- PT Adhi Karya (Tbk) masih tertarik jalur monorel yang digarap PT Jakarta Monorail (JM). Ini menyusul kesan lambannya JM memulai proyek tersebut. Jika dalam satu bulan, JM tidak memberi respons terkait hasil penilaian tiang pancang monorel, yang sebelumnya telah dibangun Adhi, maka Adhi Karya siap mengambil alih.

Dari hasil *appraisal* independen, diperoleh nilai tiang pancang yang sudah dibangun Adhi sebesar Rp 196 miliar. Angka tersebut, kemudian dijadikan acuan oleh Adhi untuk menentukan nilai kompensasi yang harus dibayarkan JM apabila ingin mengambil alih proyek tersebut.

Sekretaris Perusahaan Adhi Karya Amrozi Hamidi mengatakan, hasil *appraisal* sudah keluar yang nilainya Rp 196 miliar. Sekarang pihaknya ingin sesuai ketentuan saja. Tapi sampai sekarang belum ada respons dari JM. Jika JM tidak bisa mengerjakan proyek tersebut hingga tenggat waktu yang ditetapkan, Adhi siap mengam-

bil alih proyek itu.

Sejak awal Adhi Karya sudah siap, termasuk *grand desain*-nya. Pendaan pun siap. Untuk sekarang, Adhi Karya siap menggunakan 30 persen ekuitas, 70 persen lagi bisa diambil kredit atau obligasi.

"Jika satu bulan terlewati dan tidak ada tanggapan dari JM, berarti tiang-tiang monorel itu masih milik Adhi Karya. Jadi enggak perlu ambil alih, tinggal melanjutkan," ujarnya. Untuk tahap pertama, Adhi berencana membangun monorel dengan jalur dari Bekasi Timur ke Cawang, Cibubur ke Cawang dan Cawang-Kuningan.

"Untuk tahap pertama ini akan menghabiskan dana sekitar Rp 8 triliun," imbuh Amrozi, di sela-sela acara HUT ke-53 Adhi Karya yang dihadiri Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Dirut Adhi Karya Kiswodarmawan, digedung Adhi Karya, Jakarta Selatan, Senin (11/3).

Di bagian lain Amrozi mengatakan, pihaknya melepas seluruh saham di

JM. Saham yang dimaksud adalah kepemilikan saham atas proyek pembangunan dua jalur monorel.

"Adhi sudah melepas sahamnya, melepas saham di Jakarta Monorel senilai Rp 4,1 miliar dan USD 1,8 juta. Karena ada dua *line* yang kita lepas. Harga saham tersebut akan dilepas jika memang Adhi Karya telah memperoleh hasil perhitungan atau *appraisal*. Saham sudah kita lepas ke Jakarta Monorail, dari Jakarta Monorail mau dilepas lagi ke siapa, saya tidak tahu," jelasnya.

Saat kali pertama Adhi mengumumkan akan melepas saham di JM, lanjut dia, ada sejumlah pihak yang tertarik pada saham tersebut. Sekadar informasi, Adhi saat ini masih memiliki sekitar saham sebanyak 7,65 persen di JM. Adhi juga memiliki 24,57 persen saham di PT Indonesia Transit Central (ITC), di mana ITC adalah pemegang saham mayoritas, sebanyak 91,02 persen saham utama di Jakarta Monorail. (ers)